

## Prospek Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan di Indonesia

Cecep Fauzan Al Rifah\*, Asnita Frida Sebayang

Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*10090220072@unisba.ac.id, fridaasnita@gmail.com

**Abstract.** Indonesia is currently facing a significant challenge, namely the development gap. The gap is reflected in Indonesia's spatial economic conditions, which are dominated by economic growth and the distribution of the national population concentrated in Java. To overcome this, the government is moving the capital city from Jakarta to IKN in East Kalimantan Province as a strategic step to reduce inequality, create an inclusive and sustainable economy. The move is in line with the global agenda of Sustainable Development Goals (SDGs), especially the 10th goal that focuses on reducing inequality. The question arises on how the prospect of relocating the national capital to IKN in East Kalimantan Province in the context of inclusive and sustainable economy. This article aims to present a literature review that generates insights in this regard. This study uses a qualitative content analysis method with secondary data sources on selected literature collected through desk research. The results in this study show that the relocation of the capital city to IKN provides a positive prospect. The strategic move is projected to have a positive impact on the national economy, such as increasing GDP, inter-regional trade, investment, and economic diversification. The relocation of the capital city to IKN in East Kalimantan Province also has promising prospects for improving the national economy and reducing disparities between regions in Indonesia. This strategic step is in line with the SDGs' goal to reduce inequality, and build an inclusive and sustainable economy.

**Keywords:** *IKN, Inclusive and Sustainable Economy, SDGs.*

**Abstrak.** Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan yang cukup besar, yaitu kesenjangan pembangunan. Kesenjangan tersebut tergambar dari kondisi ekonomi spasial Indonesia yang didominasi pertumbuhan ekonomi dan sebaran populasi nasional yang terkonsentrasi di Pulau Jawa. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melakukan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN di Provinsi Kalimantan Timur sebagai langkah strategis untuk mengurangi kesenjangan, menciptakan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Langkah tersebut sejalan dengan agenda global *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama tujuan ke-10 yang berfokus pada pengurangan kesenjangan. Pertanyaan muncul tentang bagaimana prospek dari pemindahan ibu kota negara ke IKN di Provinsi Kalimantan Timur dalam konteks ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Artikel ini bertujuan untuk menyajikan studi literatur yang menghasilkan pemahaman yang berkenaan dengan hal tersebut. Kajian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) kualitatif dengan sumber data sekunder pada literatur-literatur terpilih yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, dengan dilakukannya pemindahan ibu kota ke IKN memberikan prospek yang positif. Dengan dilakukannya langkah strategis tersebut diproyeksikan akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional, seperti peningkatan PDB, perdagangan antar wilayah, investasi, dan diversifikasi ekonomi. Pemindahan ibu kota ke IKN di Provinsi Kalimantan Timur juga memiliki prospek yang menjanjikan untuk meningkatkan perekonomian nasional dan mengurangi kesenjangan antar wilayah di Indonesia. Langkah strategis ini sejalan dengan tujuan SDGs untuk mengurangi kesenjangan, serta membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *IKN, Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, SDGs.*

## A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan keanekaragaman sumber daya yang dimilikinya, namun pada saat ini Indonesia sedang menghadapi tantangan besar berupa kesenjangan pembangunan. Kesenjangan tersebut tergambar dari kondisi ekonomi spasial Indonesia yang menunjukkan ketimpangan antar wilayah, mulai dari dominasi pertumbuhan ekonomi dan sebaran populasi nasional yang terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pada tahun 2020 Pulau Jawa mendominasi sebaran penduduk sebanyak 55,94 persen dari total penduduk di Indonesia, dan pada tahun 2018 Pulau Jawa menjadi wilayah yang berkontribusi sebesar 58,49 persen terhadap ekonomi nasional (1).

Kepadatan penduduk yang tidak merata dan hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa tersebut menunjukkan aglomerasi pembangunan dan kemajuan yang tinggi di Pulau Jawa, sedangkan wilayah lainnya justru mengalami ketertinggalan. Kondisi ini dapat membentuk kesenjangan di berbagai aspek, yang kemudian dapat menimbulkan stagnasi ekonomi yang sulit untuk diperbaiki (2). Situasi tersebut tentu saja tidak menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, karena potensi daerah yang tidak dimanfaatkan secara optimal tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemerataan di seluruh wilayah di Indonesia.

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, salah satu solusi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah melakukan pemindahan ibu kota negara. Ibu kota negara yang sebelumnya berada di Jakarta kemudian dipindahkan ke daerah yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya daerah tersebut diberi nama Ibu Kota Negara Nusantara (IKN). Pemindahan ibu kota tersebut diharapkan dapat menjadi langkah efektif dalam membentuk pembangunan yang inklusif, dengan menyebarluaskan magnet pertumbuhan ekonomi baru di daerah lain, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Selain itu, dengan dilakukannya pemindahan ibu kota negara ke IKN di Provinsi Kalimantan Timur tersebut tentu dapat menghindari bias Jawa-sentris yang terjadi (3).

Pemindahan ibu kota negara yang dilakukan oleh Indonesia bukan merupakan hal yang baru terjadi di dunia internasional. Pemindahan tersebut bahkan telah dilakukan jauh-jauh hari oleh beberapa negara di dunia. Sebagai contoh, pada tahun 1913 Australia telah memindahkan ibu kota negara mereka dari Melbourne ke Canberra. Selain itu, pada tahun 1960 Brazil telah meresmikan pemindahan ibu kota negaranya dari Rio De Janeiro ke Brasilia dengan tujuan yang serupa, yaitu menciptakan pemerataan pembangunan. Beberapa negara lainnya juga telah melakukan pemindahan yang sama, di antaranya seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Malaysia.

Di antara negara-negara tersebut, Brazil menjadi salah satu role model bagi Indonesia dari keputusan untuk melakukan pemindahan ibu kota negara. Brazil dianggap berhasil dan mendapatkan dampak positif dari pemindahan ibu kota negara mereka. Dampak positif yang didapatkan oleh Brazil dalam memindahkan ibu kota negaranya seperti terjadinya pemerataan penduduk, bertambahnya jumlah pekerjaan, dan peningkatan pendapatan. Namun, di saat yang bersamaan hal tersebut juga tentu memiliki ancaman, karena dapat menyebabkan terjadinya kutub kemiskinan dan pengangguran. Aziz (4) berpendapat, bahwa Malaysia yang telah memindahkan ibu kota administratifnya pada tahun 1999 dari Kuala Lumpur ke Putrajaya tidak dianggap sepenuhnya sukses. Meskipun Putrajaya telah menjadi pusat pemerintahan, namun Kuala Lumpur masih menjadi pusat ekonomi, dan banyak warga Malaysia tidak tertarik untuk tinggal di Putrajaya. Hal tersebut menyebabkan Putrajaya selaku ibu kota negara cenderung sepi, terutama pada akhir pekan.

Inisiatif pemindahan ibu kota oleh Indonesia juga sejalan dengan agenda global yang dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs yang disepakati oleh 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015. SDGs tersebut memiliki tujuan utama untuk mempromosikan hak atas pembangunan yang berkelanjutan, baik secara sosial, ekonomi, serta lingkungan. Hal tersebut dirancang untuk mencapai kehidupan yang lebih berkelanjutan dan lebih baik bagi semua orang yang ada di planet ini (6). Agenda SDGs tersebut dirancang dengan target pencapaian pada tahun 2030 dan dikemas dalam 17 tujuan, dan salah satu tujuannya yaitu mengurangi kesenjangan yang ada pada tujuan ke-10 (5). Tujuan ke-10 tersebut berfokus pada tercapainya keadilan dan inklusivitas dalam pembangunan di seluruh dunia.

Pemindahan ibu kota ke IKN diyakini dapat memberikan berbagai prospek peluang untuk mengatasi kesenjangan yang ada di Indonesia. Dengan adanya pemindahan ibu kota tersebut memiliki dampak ekonomi dalam berbagai skala waktu. Menurut Bappenas (7) dalam jangka pendek pemindahan ibu kota negara ke IKN di Provinsi Kalimantan Timur ini dapat mendorong perekonomian melalui investasi infrastruktur, perdagangan inter-lokal di Indonesia, output sektor lain, penciptaan kesempatan kerja, dan bahkan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dampak ekonomi jangka menengah dan jangka panjang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, mendorong sektor non-primer untuk berkembang, diversifikasi ekonomi di Indonesia, serta mengurangi ketimpangan perdagangan. Lebih jauh lagi, langkah ini dapat berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah, baik dalam pendapatan ekonomi, akses terhadap fasilitas publik, maupun kesempatan ekonomi yang dapat berkontribusi signifikan terhadap pencapaian pembangunan di Indonesia. Dengan demikian, pemindahan ibu kota negara ini tidak hanya memiliki potensi untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan tersebut, kemudian menghasilkan perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: “bagaimana prospek dari pemindahan ibu kota negara ke IKN di Provinsi Kalimantan Timur dalam konteks ekonomi inklusif dan berkelanjutan”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini, yaitu “menganalisis prospek pemindahan ibu kota negara ke IKN di Provinsi Kalimantan Timur dalam konteks ekonomi inklusif dan berkelanjutan.”

## **B. Metodologi Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena serta prospek dari pemindahan ibu kota negara ke IKN dalam konteks ekonomi. Pendekatan kualitatif ini berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang cenderung menekankan terhadap pengukuran statistik dan angka, metode kualitatif ini cenderung menekankan terhadap interpretasi, pemahaman konteks, serta makna yang subjektif. Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk memperoleh hasil yang lebih menekankan makna daripada generalisasi, serta analisisnya bersifat induktif, deskriptif dan kontekstual (8). Sedangkan untuk metode analisisnya, penulis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) terhadap data-data sekunder berupa dokumen dan literatur terpilih yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*). *Library research* ini merupakan kegiatan pengumpulan data pustaka (9). Adapun metode analisis isi (*content analysis*) yang digunakan ini merupakan metode penelitian yang dilakukan digunakan untuk membuat simpulan dari sebuah teks, yang menjadi gagasan penulis dalam sebuah tulisannya (10).

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Prospek Ekonomi Pemindahan Ibu Kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN)**

Ibu kota memiliki peran strategis bagi suatu negara, yang tidak hanya bagi penyelenggaraan pemerintahannya saja. Hal ini didasarkan pada ibu kota yang memiliki peran sebagai pusat perumusan berbagai arah kebijakan pembangunan nasional, contoh keberhasilan pembangunan suatu negara, dan representasi suatu negara dalam kacamata internasional (11). Maka dari itu, ibu kota memiliki peran yang penting bagi suatu negara tidak hanya sebagai tempat bagi kepentingan suatu negara, namun juga sebagai representasi citra dari suatu negara secara internasional.

Didasarkan kepada pemahaman tersebut, pemindahan ibu kota negara ke IKN yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur telah menjadi isu nasional yang mendapatkan atensi dari seluruh kalangan masyarakat. Mengingat ibu kota merupakan hal yang sangat penting bagi suatu negara. Berbagai kajian telah dilakukan untuk menemukenali tentang bagaimana strategi, potensi, dampak, hingga keberhasilan dari terlaksananya pemindahan IKN tersebut dalam berbagai disiplin ilmu. Keputusan besar ini pertama kali diumumkan oleh Presiden Joko Widodo

pada tahun 2019. Presiden menyatakan bahwa langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi kesenjangan melalui pemerataan pembangunan, mengurangi beban Jakarta, serta menciptakan pusat pertumbuhan di luar Pulau Jawa.

Pemindahan ibu kota ini bukanlah langkah yang dilakukan tanpa perhitungan yang matang. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh Bappenas (12) dengan dilakukannya pemindahan ibu kota ke IKN merupakan langkah strategis yang dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional. Bappenas memproyeksikan bahwa langkah strategis ini dapat meningkatkan perekonomian nasional dengan probabilitas 0,1 persen kenaikan PDB nasional. Kenaikan tersebut merupakan efek positif dari hasil pemanfaatan potensi sumber daya yang selama ini belum diberdayakan secara optimal. Salah satu dampak dari optimalisasi potensi tersebut adalah peningkatan perdagangan antar wilayah, yang sebelumnya hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Bahkan langkah strategis tersebut dapat menyebabkan terjadinya peningkatan arus perdagangan yang dirasakan oleh lebih dari 50 persen wilayah di Indonesia. Amila dkk (13) mendukung pandangan tersebut dengan menjelaskan bahwa dengan dilakukannya langkah strategis ini akan menyebabkan terjadinya pengembangan perdagangan antar daerah, terutama perdagangan antara Pulau Jawa dan Kalimantan yang memungkinkan terbentuknya nilai ekonomi yang lebih maju.

Bappenas juga menjelaskan bahwa langkah strategis tersebut tidak hanya memungkinkan untuk mendorong perdagangan antar wilayah saja, namun dapat berpotensi memicu peningkatan investasi, terutama di wilayah sekitar ibu kota yang baru. Investasi merupakan salah satu kunci utama sebuah negara dalam mendorong pertumbuhan ekonominya. Dengan adanya pemindahan ibu kota diharapkan akan terjadinya peningkatan investasi di berbagai sektor ekonomi. Salah satu investasi terkini yang akan terjadi di IKN yang ada di Provinsi Kalimantan Timur yaitu infrastruktur. Dengan adanya investasi dalam infrastruktur dan pengembangan kawasan ibu kota yang baru akan menciptakan peluang ekonomi baru, yang kemudian dapat menarik minat investasi dalam negeri maupun investasi asing. Bahkan Bappenas juga menjelaskan bahwa dengan adanya langkah strategis ini akan mendorong diversifikasi ekonomi, yang akan mendorong peningkatan *output* ekonomi pada beberapa sektor jasa, yang kemudian akan menaikkan biaya tenaga kerja sebesar 1,37 persen, dan dapat menciptakan nilai tambah pada perekonomian nasional.

Pemindahan ibu kota ke IKN juga telah ditetapkan strategi pertumbuhan kutub, dengan melakukan pemusatan investasi serta pengembangan infrastruktur di IKN sebagai pusat perekonomian. Dengan adanya pendekatan tersebut berpotensi menjadikan IKN sebagai pusat kegiatan ekonomi yang dapat menarik investasi dan migrasi tenaga kerja, bahkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di sekitarnya. Berdasarkan analisis dari Bank Indonesia (14), mereka memproyeksikan pertumbuhan investasi di Kalimantan Timur akan tumbuh positif, yang didukung oleh pembangunan infrastruktur yang sejalan dengan optimisme kinerja dari lapangan usaha utama yang ada di Kalimantan Timur. Pertumbuhan investasi Kalimantan Timur ini ditopang salah satunya oleh progres pembangunan IKN tahap 1 yang kini sudah mencapai 52,89 persen pada November 2023 (15). Peluang investasi yang besar disertai dengan pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan tersebut akan meningkatkan terjadinya produktivitas ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur dan akan memberikan *spread effect* pada wilayah sekitarnya. Berdasarkan capaian dan potensi investasi pemindahan ibu kota ke IKN tersebut kemudian dapat menjadi potensi terjadinya pemerataan ekonomi Indonesia (16).

Pemindahan ibu kota ke IKN membawa harapan baru bagi pengembangan Sumber Daya Manusia di Provinsi Kalimantan Timur. Dengan adanya ibu kota tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas dasar SDM masyarakat sekitar, seperti dalam pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Banyaknya fasilitas sarana dan prasarana yang akan dibangun untuk mendukung peningkatan ekonomi, tentu dapat mendorong pendidikan dan kesehatan yang menjadi tolok ukur dari nilai indeks pembangunan manusia. Bahkan penelitian yang dilakukan oleh Wahidah dkk (17) menjelaskan, bahwa dengan dilakukannya pemindahan ibu kota negara ke IKN akan meningkatkan nilai indeks pembangunan manusia (IPM) Kalimantan secara keseluruhan, dan terkhusus Provinsi Kalimantan Timur secara signifikan.

Proses pemindahan ibu kota melibatkan biaya yang sangat besar, baik dari aspek finansial, logistik, maupun sosial. Hal tersebut tentu saja menghadapkan Indonesia pada tantangan dalam proses pemindahan ibu kota negaranya, menurut Miftah (18) pembangunan infrastruktur pendukung ibu kota baru di masa depan menjadi salah satu tantangan bagi keberhasilan pemindahan ibu kota baru. Dengan adanya kondisi tersebut tentu dibutuhkan perencanaan yang matang dan diantisipasi dengan bijak. Meskipun demikian, tantangan tersebut dapat diimbangi dengan potensi besar yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru. Saraswati dan Adi (19) dalam penelitiannya menjelaskan, tantangan tersebut dapat diimbangi dengan potensi ketersediaannya infrastruktur eksisting dan akses IKN dekat dengan kota-kota yang sudah berkembang, seperti adanya infrastruktur Kota Balikpapan dan Samarinda yang dirasa cukup lengkap dan aksesibilitasnya cukup dekat untuk dijangkau. Potensi tersebut berupa tersedianya infrastruktur utama seperti jalan tol Balikpapan-Samarinda, Trans Kalimantan, serta bandara dan pelabuhan yang tersedia di Balikpapan dan Samarinda. Selain itu Paramananda dan Muta'ali (20) menjelaskan, bahwa secara komprehensif, wilayah calon lokasi ibu kota negara baru seperti Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagian wilayahnya sudah cukup mendukung untuk dilakukannya pembangunan IKN.

### **Pemindahan Ibu Kota Sebagai Langkah Menuju Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan**

Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru Negara Indonesia tentu bukan sebuah keputusan yang diambil secara sembarangan, melainkan didasarkan kepada berbagai pertimbangan strategis. Pertimbangan tersebut bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Provinsi Kalimantan Timur yang berada di tengah Indonesia dianggap dapat memiliki nilai tinggi untuk dijadikan sebagai aktivitas perekonomian yang dapat setara seperti Jakarta (11). Lokasi yang strategis ini memungkinkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai *hub* penting dalam jaringan ekonomi, baik itu pada tingkat nasional maupun internasional.

Setelah adanya pemindahan ibu kota tersebut juga diharapkan dapat memicu terjadinya fenomena urbanisasi seperti yang terjadi di Jakarta selama beberapa dekade terakhir (21). Urbanisasi ini tidak hanya akan mendorong pertumbuhan populasi di Kalimantan Timur, tetapi juga dapat menciptakan pusat-pusat ekonomi baru di wilayah timur Indonesia, yang selama ini relatif tertinggal. Proses urbanisasi yang diharapkan ini bisa menjadi katalis bagi pengembangan kawasan perkotaan baru.

Untuk memancing urbanisasi, pemerintah Indonesia telah merencanakan pemindahan bagi pejabat pemerintahan seperti Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan adanya pemindahan ASN yang diperkirakan sebanyak 118 ribu orang yang kemungkinan diikuti oleh keluarganya memungkinkan membawa dampak positif bagi ibu kota baru (22). Dengan adanya perpindahan tersebut tentu dapat membawa dampak signifikan, baik dari segi demografi maupun ekonomi. Dengan adanya pemindahan ibu kota baru tersebut kebutuhan akan fasilitas-fasilitas kebutuhan dasar seperti hunian, sekolah, serta layanan publik lainnya akan meningkat. Sehingga, dengan terjadinya kondisi tersebut tentu dapat mendorong terjadinya aktivitas ekonomi lainnya, seperti terbukanya lapangan pekerjaan, pembangunan infrastruktur yang dapat melahirkan aktivitas bisnis, yang kemudian menjadi daya tarik transmigran mulai bermobilisasi mencari pekerjaan di ibu kota baru, dan mendorong kegiatan bisnis secara tidak langsung (23). Sehingga dengan terjadinya pemindahan ini diproyeksikan dapat meningkatkan investasi dan membuka lapangan kerja di Kalimantan Timur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia.

Mengurangi kesenjangan yang menjadi *goals* 10 dalam SDGs yang juga merupakan tujuan dari pemindahan ibu kota memerlukan pendekatan yang cermat dan strategis. Meskipun pemindahan ibu kota yang diharapkan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi yang terjadi antar wilayah di Indonesia, pengalaman sebelumnya dari berbagai negara menunjukkan bahwa pembentukan pusat pertumbuhan ekonomi baru tidak selalu berhasil seperti yang diharapkan dan berkontribusi positif terhadap pengurangan kesenjangan. Bahkan keberadaan pusat ekonomi pertumbuhan ekonomi baru yang dilakukan tanpa perencanaan hanya akan berpotensi menciptakan kesenjangan-kesenjangan baru atau dispartisiras baru di tingkat lokal. Dengan adanya pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru memungkinkan terjadinya *backwash*

*effect* atau *polarization effect*. Sehingga menyebabkan terjadinya hubungan eksploitatif antara pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan wilayah sekitarnya yang terbelakang (24).

Oleh karena itu, pemindahan ibu kota negara harus didasarkan pada perencanaan komprehensif. Dengan demikian, pemindahan ibu kota tersebut tidak hanya mampu menjadi solusi atas berbagai permasalahan pembangunan dan ekonomi, namun juga dapat secara efektif menangani tantangan perekonomian baik di tingkat nasional dan lokal. Dengan dilakukannya pemindahan ibu kota dari Jakarta menuju Provinsi Kalimantan Timur merupakan langkah strategis yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kesenjangan nasional yang saat ini terjadi (24). Pemindahan ibu kota ke Provinsi Kalimantan Timur juga memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dan pertumbuhan wilayah industri dengan rantai nilai hingga hilir. Pada akhirnya, hal tersebut kemudian dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, dan secara bertahap kemudian akan mengurangi ketimpangan ekonomi yang terjadi di antara Pulau Jawa dan wilayah lainnya di luar Pulau Jawa (25).

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Prospek ekonomi dari adanya pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur diproyeksikan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Langkah strategis tersebut diproyeksikan dapat meningkatkan PDB dengan probabilitas 0,1 persen, memperluas perdagangan antar wilayah yang akan dirasakan lebih dari 50 persen wilayah di Indonesia, kenaikan biaya tenaga kerja sebesar 1,37 persen, dan mendorong pertumbuhan investasi, terutama di sektor infrastruktur. Pemindahan ibu kota juga diharapkan dapat mendorong diversifikasi ekonomi, peningkatan produktivitas, dan menciptakan peluang ekonomi baru di wilayah tersebut. Selain itu, IKN juga diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat menarik investasi dan migrasi tenaga kerja, yang secara keseluruhan berpotensi mendorong pemerataan ekonomi dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemindahan ibu kota ke Provinsi Kalimantan timur merupakan langkah strategis yang dirancang untuk membangun ekonomi yang inklusif dan mengatasi ketimpangan antar wilayah di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan tujuan SDGs ke-10 untuk mengurangi kesenjangan di dalam maupun antar negara. Dengan letaknya yang strategis di tengah Indonesia diharapkan dapat memicu urbanisasi di wilayah timur Indonesia. Proses pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan keluarganya, yang diharapkan dapat menjadi pemicu urbanisasi lanjutan diproyeksikan akan meningkatkan permintaan terhadap fasilitas dasar dan merangsang investasi serta aktivitas bisnis di sekitarnya. Dengan adanya hal tersebut kemudian dapat menciptakan lapangan kerja baru, peningkatan kesejahteraan, dan terbangunnya ekonomi yang inklusif. Kondisi tersebut menjadi solusi untuk permasalahan pembangunan ekonomi, serta menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta sejalan dengan upaya mencapai SDGs ke-10 di seluruh wilayah Indonesia.

#### **Acknowledge**

Saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya atas doa dan dukungannya, Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang berharga, serta seluruh Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan FEB Unisba. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Setneg.go.id. (2022). IKN Nusantara Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Smart City. URL: [https://www.setneg.go.id/baca/index/ikn\\_nusantara\\_magnet\\_pertumbuhan\\_ekonomi\\_bar](https://www.setneg.go.id/baca/index/ikn_nusantara_magnet_pertumbuhan_ekonomi_bar)

- u\_dan\_smart\_city/1000. Diakses pada 15 Maret 2024.
- [2] Mazda, C. N. (2022). Analisis dampak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) terhadap social security. *Jurnal Enersia Publika: Energi, Sosial, dan Administrasi Publik*, 6(1), 1-12.
  - [3] Datupalinge, B. A., & Kusmana, D. (2024). PERAN BAPPENAS DALAM MENDUKUNG PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA (Doctoral dissertation, IPDN).
  - [4] Aziz, N. L. L. (2020). Relokasi ibu kota negara: lesson learned dari negara lain. *Jurnal Kajian Wilayah*, 10(2), 37-64.
  - [5] AR, R. A., Masrura, S. I., Yahya, A., Amin, N., Anaguna, N., Indrawati, N., & Manullang, K. R. (2024). Pemanfaatan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis TIK Melalui Gamifikasi Nearpod. *Amal Ilmiah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 243-253.
  - [6] Rahman, A. N., Viani, F. O., & Sitanggang, N. (2023). Implementasi Program Sustainable Development Goals (SDG's) dalam Upaya Penanganan Perubahan Iklim di Provinsi Kepulauan Riau. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 3(3), 341-350. Djaslim S. Intisari Pemasaran dan Unsur-unsur Pemasaran. Bandung: Linda Karya; 2003.
  - [7] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2021). *Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara*. Kementerian PPN/Bappenas, 2-24.
  - [8] Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
  - [9] Ramanda, R., Akbar, Z., & Wirasti, R. M. K. (2019). Studi kepustakaan mengenai landasan teori body image bagi perkembangan remaja. *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling*, 5(2), 121-135.
  - [10] Ahmad, J. (2018). Desain penelitian analisis isi (Content analysis). *Research Gate*, 5(9), 1-20.
  - [11] Herdiana, D. (2022). Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Transformative*, 8(1), 1-30.
  - [12] Bappenas. (2019). Dampak ekonomi dan skema pembiayaan pemindahan Ibu Kota Negara. Disampaikan dalam Dialog Nasional II Pemindahan Ibu Kota Negara, Menuju Ibu Kota Masa Depan: Smart, Green and Beautiful, Jakarta, 26.
  - [13] Amila, S., Nugraha, A. A., Sukron, A., & Rohmah, F. (2023). Analisis Dampak Dan Resiko Pemindahan Ibu Kota Negara Terhadap Ekonomi Di Indonesia. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10-18.
  - [14] Bank Indonesia. (2023). Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/default.aspx?Kategori=kalimantan%20timur&Periode=>
  - [15] Rachman, A. (2023). Gencar Bangun IKN, Ekonomi Kalimantan Timur Terus Melesat. *CNBC Indonesia*. URL: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231106130601-4-486719/gencarbangun-ikn-ekonomi-kalimantan-timur-terus-melesa>
  - [16] Simanjuntak, J. V., Muhammad, F., Al Aqilah, M. R., Raihannah, N. A., & Bakti, H. S. G. P. (2024). Potensi Ibu Kota Nusantara (IKN) Sebagai Katalisator Pemerataan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnalku*, 4(3), 275-290.
  - [17] Wahidah, A. N., Leo, S., Vinca, R. Y., & Gustia, R. (2024). Memperkirakan pengaruh pemindahan ibukota negara terhadap pertumbuhan indeks pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Timur. *Sustainable Urban Development and Environmental Impact Journal*, 1(1), 11-17.
  - [18] Miftah, F. (2024). Perlindungan hukum terhadap tanah ulayat masyarakat adat yang masuk ke dalam pembangunan ibu kota negara. *Wajah Hukum*, 8(1), 319-328.
  - [19] Saraswati, M. K., & Adi, E. A. W. (2022). Pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan analisis SWOT. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(2).
  - [20] Paramananda, D., & Muta'ali, L. (2021). Analisis Kesiapan Wilayah Calon Lokasi Ibu Kota Negara di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal*

- Bumi Indonesia, 10(1).
- [21] Absor, M., Mubarrak, M., & Puspitaningrum, S. (2023). Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi Sosial. *Jurnal Adijaya Multidisplin*, 1(05), 1052-1063.
  - [22] Mazda, C. N. (2022). Analisis dampak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) terhadap social security. *Jurnal Enersia Publika: Energi, Sosial, dan Administrasi Publik*, 6(1), 1-12.
  - [23] Taufiq, M. (2017). Pemindahan ibu kota dan potensi konektivitas pemerataan ekonomi. In *Prosiding Seminar Nasional Pemindahan ibu kota Negara* (pp. 99-115).
  - [24] Santoso, A. P. (2020). MUTATIS MUTANDIS PENGGUNAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2007 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1985 TERKAIT PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. *Ilmu dan Budaya*, 41(69).
  - [25] Silalahi, S. A. F. (2019). Dampak ekonomi dan risiko pemindahan ibu kota negara. *Info Singkat*, 11(16), 19-24.
  - [26] Herawati, N. T. (2015). Kontribusi Pembelajaran Di Perguruan Tinggi Dan Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, 48(1-3), 60-70. <https://doi.org/10.23887/jppundiksha.v48i1-3.6919>
  - [27] Novi Ariani, & Ima Amaliah. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Nilai Tukar Terhadap Neraca Perdagangan Indonesia-China. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 75-84. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i2.2882>